

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara

Nabilla Dwi Agintha

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

nabilla@umsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/19226>

ABSTRACT

Performance is the Output/Result of the Program/Activity to be or has been achieved in connection with the use of budget with measurable quantity and quality. Financial Performance is determined by many factors. The purpose of the research was to obtain empirical evidence of the Influence of Local Government Characteristics proxied by Local Government Size, Regional Wealth Level, Level of Dependence on Central and Capital Expenditure and Bpk Audit Findings on Financial Performance. The type of research used is quantitative research. This research was conducted on the District / City Government in North Sumatra Province. The population in this study was 33 populations with a period of 4 years of research, so the number of observations in this study was 132 data. The data analysis method used in this study is Data Panel Regression Analysis conducted with the help of Eview software. The result of the coefficient of determination was 0.432173 or (43.21%) meaning that independent variables can explain Financial Performance, the remaining 56.79% is explained by other variables that are not included in the research model. The F test results show that the Size of Local Government, Regional Wealth Level, Level of Dependence on The Center, Capital Expenditure and Bpk Audit Findings have a joint effect on Financial Performance. The results of the T test showed that the Size of Local Government, The Level of Dependence on the Center, and Capital Expenditure had a positive and significant effect on alpha five percent on Financial Performance while the Regional Wealth Level and bpk audit findings did not have a significant influence on financial performance.

Keywords: *Financial Performance, Characteristics of Local Government, Size of Local Government, Level of Regional Wealth, Level of Dependence on Central, Capital Expenditure, Audit Findings*

Cara Sitasi: Agintha, N.D (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, vol 24.(1), 42-54 <https://doi.org/10.30596/19226>

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan undang-undang. Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Diberlakukannya otonomi daerah memiliki fungsi agar setiap daerah akan lebih maju, mandiri, sejahtera dan dapat melaksanakan pemerintah daerah agar mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan

antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar dan dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk beberapa aspek yakni, aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan pasar internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan stakeholders, dan waktu (Kusuma & Handayani, 2017). Sebagai gambaran kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Total Kinerja Keuangan berdasarkan Pendapatan dan Belanja

	Anggaran		Realisasi		Kinerja Keuangan	
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
2016	51.780.863.821.573	52.940.565.756.654	50.740.816.945.832	49.817.055.890.725	98%	94%
2017	53.917.594.948.777	56.252.066.318.935	53.386.782.584.752	54.296.775.516.032	99%	97%
2018	55.840.461.024.288	58.743.620.159.913	54.333.986.674.368	54.147.817.670.373	97%	92%
2019	61.306.666.192.223	62.580.129.637.162	58.339.207.736.796	57.910.329.690.511	95%	93%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Dari gambar ini dapat kita lihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2019 terus menurun. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara belum optimal untuk setiap tahunnya dalam merealisasikan target. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara-lain; faktor keuangan dan faktor lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2011) menggunakan variabel pengungkapan dari laporan keuangan daerah yang diwakili oleh revenue, expenditure, pajak, real estate, grant, capital, GDP (Gross Domestic Product), sebagai faktor keuangan dan employment sebagai faktor lingkungan. (Patrick, 2007) telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Ia meneliti tentang komponen organisasi yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi inovasi administratif. Variabel yang digunakan untuk memproksikan karakteristik daerah terdiri dari (a) ukuran daerah; (b) functional differentiation; (c) umur daerah; dan (d) intergovernmental revenue. Penelitian yang dilakukan (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran daerah (size), jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Status Daerah untuk memproksikan karakteristik pemerintah daerah. Penelitian (Harumiati & Payamta, 2014) menggunakan ukuran daerah (size), tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Astarani, 2018). Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan

pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari adanya berbagai macam tindak kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan uraian serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada peneliti untuk variabel yang sama, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang terhadap faktor yang sama. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, Temuan Audit BPK. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sudarsana, 2013) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode waktu penelitian penelitian ini meneliti periode 2016-2019. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab / Kota Pada Provinsi Sumatera Utara”.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Berdasar agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Undang-Undang No.15, 2004). Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya informatif asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Adi Setiawan, 2012)

Kinerja keuangan

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah dikenal 2 macam, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan, yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Terdapat empat rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu : Rasio kemandirian, rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Marfiana & Kurniasih, 2018). Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Aditya, 2011). Dengan demikian, karakteristik daerah memiliki pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat terlihat dengan adanya fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Chaganti & Damanpour, 1991). Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktivitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Patrick, 2007). Pengeluaran besar pemerintah daerah harus mengandalkan pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, tingkat pendapatan akan secara langsung mempengaruhi karyawan dan organisasi yang didukung keuangan dan, akhirnya, ukuran pemerintah (Zhang, 2016).

Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan tujuan output dan kebijakan yang diinginkan suatu daerah dan PDB per kapita ukuran yang memadai (Lehmann & Menter, 2016). Tingkat kekayaan Pemerintah daerah diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.15, 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah salah satu bagian dari Dana Perimbangan atau *Intergovernmental Revenue*. Salah satu masalah yang mempersulit identifikasi kausal dampak transfer antarpemerintah terhadap pendapatan lokal adalah bahwa jumlah hibah pemerintah pusat yang kemungkinan akan endogen terhadap kapasitas fiskal kabupaten (Masaki, 2018). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pembayaran untuk membeli aset tetap atau untuk meningkatkan umur yang berguna dari aset tetap yang ada. Dengan kata lain, belanja modal dilakukan untuk mengakuisisi atau meningkatkan aset tetap seperti peralatan, properti, dan bangunan

industry (Özbebek et al., 2011). Belanja modal adalah salah satu yang paling penting keputusan perusahaan tentang strategi pertumbuhan. Seringkali melibatkan dampak signifikan pada kedua arus kas risiko yang relevan dari perusahaan penyiaran (Chen & Chang, 2020). Belanja modal penting bagi investor. Belanja modal rata-rata lebih dari lima persen dari total aset dan lebih dari enam persen dari total penjualan (Beyer et al., 2015). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina, 2015).

Temuan Audit BPK

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Astarani, 2018). hal penting dalam audit keuangan lokal adalah jumlah temuan dan jenis opini. Berdasarkan temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan membuat beberapa Rekomendasi. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengambil beberapa tindakan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas temuan tersebut (Djanegara, 2016). Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal dikarenakan tujuan dari penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan yang bersifat sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya (Daulay, 2010). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang bersumber dari data APBD dan laporan realisasi APBD yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui portal www.bps.go.id dan melalui portal Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) di www.djpk.kemenkeu.go.id. Data tersebut merupakan kombinasi dari data runtut waktu (*time-series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan secara *cross-section* yang dikumpulkan pada suatu titik tertentu (Aswita, 2012) yang disebut dengan *pooling data* dengan *combined model*. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016-2019 yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sensus, yaitu dimana semua populasi dijadikan obyek penelitian. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu-persatu. Sampel dalam penelitian kali ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/kota Sumatera Utara tahun 2016-2019 secara berturut-turut adalah 33 pmda dengan jangka waktu 4 (enam) periode laporan keuangan sehingga terdapat 132 unit analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Observations	Minimum	Maximum	Mean	Std.
----------	--------------	---------	---------	------	------

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 24, No.1, Tahun 2024, hal 42-54

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

					Deviation
Kinerja Keuangan	132	0.802868	1.125223	1.001904	0.046072
Ukuran Pemerintah Daerah	132	27.53943	31.12454	28.37636	0.621664
Tingkat Kekayaan Daerah	132	0.016120	0.394586	0.091695	0.064416
Tingkat Ketergantungan Pada Pusat	132	0.300835	0.691387	0.547433	0.067874
Belanja Modal	132	0.096545	0.368471	0.212127	0.055417
Temuan Audit BPK	132	0.000521	0.198013	0.008559	0.024435

Sumber: Hasil Olah Software Eviews.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai minimum dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab / Kota Pada Provinsi Sumatera Utara adalah 0.802868. sementara nilai maksimum dari Kinerja Keuangan adalah 1.125223. Nilai mean dari Kinerja Keuangan adalah 1.001904, sementara nilai standar deviasi dari Kinerja Keuangan adalah 0.046072. Observasi yang digunakan pada variabel Kinerja Keuangan sebanyak 132 data. Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 132, di mana rata-rata jumlah Ukuran Pemerintah Daerah (X1) sebesar 28.37636 dengan standar deviasi 0.621664 dan jumlah terendah 27.53943, sementara Nilai Maksimum sebesar 31.12454. Diketahui nilai minimum dari Tingkat Kekayaan Daerah (X2) adalah 0.016120, sementara nilai maksimum Tingkat Kekayaan Daerah adalah 0.394586. Nilai mean dari Tingkat Kekayaan Daerah adalah 0.091695, sementara nilai standar deviasi dari Tingkat Kekayaan Daerah adalah 0.064416. Observasi yang digunakan pada variabel Tingkat Kekayaan Daerah sebanyak 132 data. Diketahui nilai minimum dari Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X3) adalah 0.300835, sementara nilai maksimum dari Tingkat Ketergantungan Pada Pusat adalah 0.691387. Nilai mean dari Tingkat Ketergantungan Pada Pusat adalah 0.547433, sementara nilai standar deviasi dari Tingkat Ketergantungan Pada Pusat adalah 0.067874. Observasi yang digunakan pada variabel Tingkat Ketergantungan Pada Pusat sebanyak 132 data. Diketahui nilai minimum dari Belanja Modal (X4) adalah 0.096545, nilai maksimum dari Belanja Modal adalah 0.368471. Nilai mean dari Belanja Modal adalah 0.212127, sementara nilai standar deviasi dari Belanja Modal adalah 0.055417. Observasi yang digunakan pada variabel Belanja Modal sebanyak 132 data. Diketahui nilai minimum dari Temuan Audit BPK (X5) adalah 0.000521, Sementara nilai maksimum dari Temuan Audit BPK adalah 0.198013. Nilai mean dari Temuan Audit BPK adalah 0.008559, sementara nilai standar deviasi dari Temuan Audit BPK adalah 0.024435. Observasi yang digunakan pada variabel Belanja Modal sebanyak 132 data.

Uji Chow

Untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, maka dilakukan Uji Chow (*Chow test*). Uji ini bertujuan untuk menentukan manakah model yang paling baik diantara keduanya yaitu *fixed effect* (FE) atau *common effect* (CE).

Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect* lebih baik dibandingkan model *fixed effect*.

H_1 : Model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *common effect*

Nilai *probability* Uji Chow terlihat berdasarkan probabilitas *Cross-section Chi-Square* pada tabel di lampiran 4 halaman 80 yang memiliki nilai $0.0011 < 0.05$. Berdasarkan tabel tersebut maka Uji Chow menyatakan bahwa model estimasi yang lebih baik adalah *fixed effect* (FE) dari pada *common effect* (CE).

Uji Hausman

Setelah melakukan Uji Chow dan menentukan estimasi yang terbaik adalah *fixed effect*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji Hausman untuk menguji kembali model yang lebih baik antara *fixed effect* (FE) atau *random effect* (RE). Berikut hasil pengujian untuk memilih apakah estimasi yang terbaik adalah *random effect* (RE) atau *fixed effect* (FE) dengan uji *Hausman*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *random effect*.

H_1 : Model *random effect* lebih baik dibandingkan model *fixed effect*.

Dapat diketahui bahwa nilai *P Value Cross-section Random* lebih kecil dari 0.05 ($0.05 > 0.0000$) terlihat dari tabel di lampiran 4 halaman 81 yang berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *fixed effect* (FE) daripada *random effect* (FE). Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa adalah *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*. Dengan hasil tersebut, maka pengujian lanjutan yaitu Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan karena hasil uji hausman menunjukkan bahwa model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*.

Uji Asumsi Klasik

Karena hasil model yang didapatkan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) maka tidak dilakukan uji asumsi klasik karena regresi linier nya berbasis *General Least Square* (GLS). Teknik GSL dipercaya mengatasi metode adanya autokorelasi runtun waktu (*time series*) serta korelasi antar observasi (*cross section*). Metode GSL menghasilkan estimator untuk memenuhi sifat *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE) yang merupakan metode *treatment* untuk mengatasi pelanggaran asumsi homoskedastisitas dan autokorelasi (Gujarati, 2015).

Pengujian Analisis Regresi Dengan Data Panel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan. Pada pemilihan metode estimasi pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa metode estimasi yang terbaik digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect* (FE). Sehingga hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Data Panel Dengan *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.088071	0.040110	2.195716	0.0306
X2	0.405005	0.231338	1.750707	0.0833
X3	0.568528	0.140426	4.048581	0.0001
X4	0.552006	0.117554	4.695772	0.0000

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 24, No.1, Tahun 2024, hal 42-54

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

X5	-0.038268	0.168809	-0.226692	0.8212
C	-1.962364	1.155725	-1.697951	0.0928

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews

Berdasarkan table diatas dapat diketahui persamaan regresi liniernya, yaitu:

$$Y = -1.962364 + 0.088071X_1 + 0.405005X_2 + 0.568528X_3 + 0.552006X_4 - 0.038268X_5 + e$$

1. Konstanta (a) = -1.962364 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka variabel Kinerja Keuangan (Y) sama dengan -1.962364.
2. Koefisien Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) = 0.088071, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Ukuran Pemerintah Daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Keuangan justru akan mengalami kenaikan sebesar 0.088071. Nilai *Coefficients* bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) dengan Kinerja Keuangan (Y) artinya jika Ukuran Pemerintah Daerah meningkat maka Kinerja Keuangan juga akan meningkat.
3. Koefisien Tingkat Kekayaan Daerah (X_2) = 0.405005, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Tingkat Kekayaan Daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka Kinerja Keuangan justru akan mengalami kenaikan sebesar 0.405005. Nilai *Coefficients* bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Tingkat Kekayaan Daerah (X_2) dengan Kinerja Keuangan (Y) artinya jika Tingkat Kekayaan Daerah meningkat maka Kinerja Keuangan justru akan meningkat.
4. Koefisien Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X_3) adalah 0.568528, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Tingkat Ketergantungan Pada Pusat mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan mengalami kenaikan sebesar 0.568528. Nilai *Coefficients* bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X_3) dengan Kinerja Keuangan (Y) artinya jika Tingkat Ketergantungan Pada Pusat meningkat maka Kinerja Keuangan juga akan meningkat.
5. Koefisien Belanja Modal (X_4) adalah 0.552006, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan Belanja Modal mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan justru akan mengalami kenaikan sebesar 0.552006. Nilai *Coefficients* bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara Belanja Modal (X_4) dengan Kinerja Keuangan (Y) artinya Belanja Modal meningkat maka Kinerja Keuangan juga akan meningkat.
6. Koefisien Temuan Audit BPK (X_5) adalah -0.038268, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan Temuan Audit BPK mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Keuangan justru akan mengalami penurunan sebesar -0.038268. Nilai *Coefficients* bernilai negatif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang negatif antara Temuan Audit BPK (X_5) dengan Kinerja Keuangan (Y) artinya, jika Temuan Audit BPK meningkat maka Kinerja Keuangan akan menurun.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. *Range* nilainya adalah 0 sampai 1, apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya apabila R^2 besar

(mendekati nilai 1) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar. Besarnya nilai R^2 di tabel lampiran 4 halaman 82 adalah sebesar 0.432173 atau (43,21%) variabel independen yaitu diartikan Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK mampu menjelaskan Kinerja Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 56,79% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan pengujian statistik F pada tabel di lampiran 4 halaman 82, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan 0.005677 lebih kecil dari 0.05. Hasil uji F ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu yakni Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \xi_i = 0$, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

1. $H_1 : \xi_i \neq 0$, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai *probability value* (*p value*) $< \alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau H_1 (parsial) dapat diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai *probability value* (*p value*) $> \alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau H_1 (parsial) tidak dapat diterima.

Tabel Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.088071	0.040110	2.195716	0.0306
X2	0.405005	0.231338	1.750707	0.0833
X3	0.568528	0.140426	4.048581	0.0001
X4	0.552006	0.117554	4.695772	0.0000
X5	-0.038268	0.168809	-0.226692	0.8212
C	-1.962364	1.155725	-1.697951	0.0928

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, dan Belanja Modal secara parsial (individual) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Namun variabel Tingkat Kekayaan Daerah dan Temuan Audit BPK secara parsial terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara rinci berikut penjelasan mengenai hasil uji t dalam penelitian ini:

1. Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) memiliki nilai probabilitas $0.0306 < 0.05$, artinya Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
2. Tingkat Kekayaan Daerah (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0833 > 0.05$, artinya Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial tidak memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0001 < 0.05$, artinya Tingkat Ketergantungan Pada Pusat secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan
4. Belanja Modal (X_4) yang memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, sehingga Belanja Modal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
5. Temuan Audit BPK (X_5) yang memiliki nilai probabilitas sebesar $0.8212 > 0.05$, sehingga Temuan Audit BPK secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

PEMBAHASAN

Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Chaganti & Damanpour, 1991) Pengeluaran besar pemerintah daerah harus mengandalkan pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, tingkat pendapatan akan secara langsung mempengaruhi karyawan dan organisasi yang didukung keuangan dan, akhirnya, ukuran pemerintah (Zhang, 2016). Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar. Pengukuran ukuran pemerintah daerah di bahas secara luas, ada beberapa proksi yaitu : Konsumsi Pemerintah /PDB, Pengeluaran Anggaran / PDB, Anggaran dan nonaktif pengeluaran anggaran / PDB, Konsumsi Pemerintah per kapita, Pengeluaran Anggaran per kapita, Anggaran dan nonaktif - pengeluaran anggaran per kapita (S. Zhang, 2016). Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian (S. Zhang, 2016) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Tingkat Kekayaan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Kekayaan daerah merupakan tujuan output dan kebijakan yang diinginkan suatu daerah dan PDB per kapita ukuran yang memadai (Lehmann & Menter, 2016). Tingkat kekayaan Pemerintah daerah diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.15, 2004). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriyani, 2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. (Lehmann & Menter,

2016) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Namun sejalan dengan hasil penelitian (Marfiana & Kurniasih, 2018) tingkat kekayaan daerah; dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Tingkat Ketergantungan Pada Pusat Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah salah satu bagian dari Dana Perimbangan atau Intergovernmental Revenue. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriyani, 2012), Sumarjo (2010) yang menemukan adanya pengaruh positif antara Tingkat Ketergantungan Pada Pusat dengan Kinerja Keuangan.

Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Didukung oleh penelitian (Kusuma & Handayani, 2017) dimana memperoleh hasil bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan Audit BPK Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Astarani, 2018). Hal penting dalam audit keuangan lokal adalah jumlah temuan dan jenis opini. Berdasarkan temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan membuat beberapa Rekomendasi. Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengambil beberapa tindakan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas temuan tersebut (Djanegara, 2016). Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini & Fitriyani, 2012) dan (Marfiana & Kurniasih, 2018) yang menyatakan bahwa Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemda. Namun sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2018) yang mengatakan bahwa Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Tingkat Kekayaan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara

2016-2019. Temuan Audit BPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya terbatas pada data sekunder Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016 – 2019. Hasil R-Square yang sebesar hanya 0.432173 atau (43,21%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 56.79% faktor lain yang diluar model penelitian yang mempengaruhi Kinerja Keuangan.

REFERENSI

- Adi Setiawan, R. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. *Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10 No. 3*.
- Aditya, F. (2011). *Kamus lengkap bahasa Indonesia terkini*.
- Astarani, J. (2018). Analisis Hubungan Kinerja Pelaporan Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 7(2), 85–108.
- Aswita, E. L. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Beyer, B., Herrmann, D., & Rapley, E. T. (2015). Disaggregated Capital Expenditures. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2587124>
- Chaganti, R., & Damanpour, F. (1991). *Institutional ownership, capital structure, and firm performance*. 12(July 1989), 479–491.
- Chen, I. F., & Chang, S. C. (2020). Spillover Effects of Capital Expenditure Announcements Within Business Groups. *British Journal of Management*, 31(4), 709–727. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12379>
- Daulay, M. (2010). *Metodologi Penelitian Ekonomi*.
- Djanegara, M. S. (2016). The analysis of factors affecting the finding and opinions of local government financial statements by Audit Board of the republic of Indonesia: Studies on district municipality on the island of sumatera and Java. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(10), 6629–6652.
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*.
- Gujarati, D. N. dan D. C. P. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika (5 Buku 2)*. Salemba Empat.
- Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- Lehmann, E. E., & Menter, M. (2016). University–industry collaboration and regional wealth. *Journal of Technology Transfer*, 41(6), 1284–1307. <https://doi.org/10.1007/s10961-015-9445-4>
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51–55. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin*,

2004(32), 1–23.

- Ningsih, A. T. (2011). *Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*.
- Nugraha, A. (2018). *Pengaruh Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan, Government's Wealth, Size Of Government Serta Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. 44–48.
- Özbebek, A., Canikli, S., & Aytürk, Y. (2011). Does Turkish stock market react to public announcements of major capital expenditures? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 24, 928–934. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.044>
- Patrick, P. A. (2007). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Media Hukum* 184 (2019).
- Sudarsana, H. S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 0, Issue 0).
- Sugiyono. (2016). *“Metode Penelitian Bisnis”* (Cetakan Ke). Penerbit Alpha Beta Bandung.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*.
- Undang-Undang No.15, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Zhang, S. (2016). Fiscal Decentralization, Budgetary Transparency, and Local Government Size in China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(7), 1679–1697. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1142213>